

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang tahun 2008 adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia (Sari et al., 2021).

Dalam upaya membangun ekonomi Indonesia, Presiden RI di Tahun 2022 memberikan arahan kepada pelaku UMKM untuk melakukan perkembangan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi. Fenomena ini berperan agar UMKM dapat berkembang dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60,5% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Oleh karena itu kita sangatlah bertopang pada UMKM, selama pandemi terjadi banyak UMKM yang merasa terpuruk, akan tetapi untuk saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang terpuruk sudah kembali beroperasi dengan normal (Limanseto, 2022)

Perkembangan UMKM di Indonesia melibatkan pelaku UMKM bertahan dan siap bersaing dengan UMKM lainnya. Itu memicu pelaku UMKM untuk bisa

menciptakan bisnis baru dan berbeda tentunya dengan kinerja yang baik. Sebagian besar pemilik UMKM tidak memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, sehingga kurang berorientasi jangka panjang. Untuk meningkatkan kinerja yang cenderung tradisional karena kekurangannya pengetahuan dalam manajemen, harga produk sering kali hanya berfokus pada kondisi umum di lingkungan industri dan tenaga kerja langka di perhitungkan. Karena itu, mereka sering salah dalam pengukuran produktivitas usaha yang pada akhirnya bermuara pada kinerja usaha (Fitrianti, 2023).

Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan pada Februari 2022 tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,83%, turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan Februari 2021. Seperti yang kita ketahui ketika terjadinya krisis ekonomi pada periode tahun 1997 hingga 1998, dan hanya sektor publik yang mampu berdiri kokoh untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

Perkembangan UMKM di Indonesia memiliki manfaat yang sangat baik terhadap nilai perekonomian nasional. Di mana pada tahun 2019 UMKM mengalami peningkatan lebih dari 65.000.000 unit dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai macam masalah sehingga saat ini masalah yang terus dialami dan menjadi kendala dalam perkembangan UMKM yaitu ketebatasan modal yang dimiliki dan susahnya pelaku UMKM mengakses sumber permodalan (Kemenkop UKM, 2023)

Bank Indonesia menyatakan bahwa sekitar 93,2% UMKM saat ini berdampak negatif akibat pandemi covid-19 dari sisi penjualan yaitu 87,5%. Perkembangan sektor UMKM tahun 2020 dari total UMKM, hanya usaha

masyarakat di bidang pertanian dan *real estate* yang masih tumbuh cukup besar yaitu 16,7% dan 13%, sedangkan sektor lainnya terutama pada sektor industri kuliner banyak mengalami penurunan selama masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan omset penjualan yang menurun (Saputra, 2021).

Kondisi demikian juga terjadi pada pelaku UMKM di kota Palembang sehingga pelaku UMKM dituntut untuk lebih jeli menghadapi situasi di era digital saat ini, UMKM pada sektor industri kuliner harus lebih beradaptasi dengan memaksimalkan teknologi digital dalam bisnisnya. Terkait pengetahuan keuangan bagi pelaku UMKM di kota Palembang juga sangat penting untuk dilakukan. Pengetahuan literasi keuangan juga mampu menjadi informasi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan dana tambahan guna mendorong pertumbuhan usaha. Akses keuangan dapat mendorong UMKM untuk memperbesar ukuran perusahaan dan memungkinkan bagi perusahaan untuk membentuk organisasi yang lebih efisien (Paper, 2017)

Berdasarkan data yang ada di dinas koperasi dan UMKM Sumatera Selatan di tahun 2022 jumlah UMKM mencapai 2,2 juta dan yang terdata berjumlah 860.000 unit. Tahun 2022 jumlah dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disalurkan ke UMKM mencapai lebih kurang Rp 10,5 triliun. UMKM di Sumatera Selatan terdiri dari berbagai bidang yaitu, kuliner, fashion, kriya, kecantikan dan kebugaran dan lain-lain. Kota Palembang juga merupakan salah satu kota yang sangat berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di bidang UMKM. Dan berdasarkan data dari dinas koperasi kota Palembang jumlah UMKM yang ada di kota Palembang sekitar 80.903 di tahun 2022.

Literasi keuangan bagi UMKM adalah kemampuan pengelola dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, pengelolaan utang dan penyusunan anggaran. Keberadaan laporan keuangan UMKM ini sangat penting, agar UMKM dapat mengetahui bagaimana kemajuan dari usaha yang dilakukan. Literasi pengelolaan utang yakni UMKM dapat mendanai modal kerja dan investasinya dengan dua cara yaitu menggunakan tabungan dan dengan cara hutang kepada pihak lain. Disaat sebuah usaha memilih berhutang maka modal pribadi persentasenya menjadi berkurang dibandingkan dengan modal eksternal/hutang. Literasi penyusunan anggaran, dimana hal ini dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan usaha pada masa yang akan datang (Amri & Iramani, 2018).

Literasi keuangan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Keputusan keuangan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah akan menyebabkan terbatasnya pilihan investasi yang bisa dilakukan, sehingga potensi risiko yang dihadapi semakin meningkat.

Pandemi covid-19 menjadi awalan untuk mendorong Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang dilakukan secara lebih masif dan *borderless*, baik secara tatap muka (luring) maupun daring yang akan menjadi strategi dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan (SNLIK) 2022 menjadi faktor yang paling utama bagi OJK untuk menyusun kebijakan, strategi dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK pada tahun 2023 akan

berfokus pada meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia untuk membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategi dengan kementerian/lembaga terkait, perangkat desa dan pergerakan PKK desa dan mahasiswa.

Dalam penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peranan *financial technology* dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan UMKM di kota Palembang. Inklusi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mendapatkan akses sebagai kebutuhan (Riwayati, 2017). Inklusi keuangan mampu melakukan perubahan dalam pola berpikir para pelaku ekonomi dalam melihat uang dan keuntungan (Sanistasya et al., 2019)

Berdasarkan hasil SNLIK menunjukkan bahwa peningkatan indeks literasi dan inklusi dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2019. Hasil dari indeks literasi keuangan untuk masyarakat Indonesia mencapai 49,68% dan inklusi keuangan mencapai 85,10% pada tahun 2022. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan hasil SNLIK pada tahun 2019 yaitu Indeks literasi keuangan 38,03% dan inklusi keuangan 76,19% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, 2022)

Hasil dari SNLIK Sumatera Selatan mempunyai nilai indeks literasi keuangan sebesar 52,73% dari yang sebelumnya 40,05% dan memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 88,57% dan meningkat dari yang sebelumnya 85,08%. Provinsi Sumatera Selatan sendiri menduduki posisi ke-8 indeks inklusi keuangan nasional dan sudah di atas rata-rata nasional. Kesenjangan antara indeks literasi dengan inklusi keuangan juga menurun dari 45,03% menjadi 35,84% yang terjadi tahun 2020 yang dipacu karena adanya pandemi Covid-19, hal itu juga yang mendorong akselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan. Peningkatan

literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 juga berbanding lurus dengan peningkatan keuangan di Sumatera Selatan. Peningkatan ini juga merupakan hasil kerja sama antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, industri serta masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Nugroho & Purwanti, 2018)

Pengetahuan literasi keuangan dasar seperti inflasi, tingkat bunga, diversifikasi risiko dan bunga majemuk menjadi elemen penting bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di kota Palembang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan berdasarkan hasil survey tingkat literasi keuangan terhadap lebih dari 1.000 masyarakat kota Palembang. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menargetkan tingkat literasi keuangan mencapai 75% di tahun 2019. Pelaku UMKM yang sudah mengikuti pelatihan bisa menerapkan pengetahuan dasar keuangan agar mampu mengoptimalkan proses manajemen keuangan, untuk mendorong perkembangan bisnis UMKM (Setiawan & Saputra, 2020)

Inklusi keuangan juga masuk ke dalam program literasi keuangan, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menggunakan layanan keuangan dan mendapatkan dampak langsung dari lembaga keuangan. Semakin tinggi inklusi keuangan pada UMKM, semakin stabil keuangan suatu negara. Ini penting karena mengoptimalkan sumber dana di daerah yang ikut membantu UMKM menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Manajemen keuangan sangat penting untuk mengelola keuangan suatu usaha. Ini akan menentukan seberapa baik UMKM mengelola keuangannya. Literasi dan inklusi keuangan yang baik memastikan bahwa pelaku usaha dapat

menggunakan keahliannya di bidang finansial untuk membuat keputusan, menerapkan strategis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, memiliki akses keuangan yang memadai, dan beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis yang tidak stabil.

Presiden RI meminta supaya ada 30 juta UMKM yang go digital di 2024 yang akan datang. Lembaga yang diberikan otoritas untuk pengawasan *fintech* di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan. *Financial Technology* (*Fintech*) adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang secara pesat di seluruh dunia yang merupakan inovasi yang sedang naik daun juga di Indonesia. *Fintech* mempunyai berbagai fungsi yang beragam untuk melakukan pelayanan *electronik money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan layanan keuangan lainnya.

Bank Indonesia menjelaskan definisi tentang *Financial Technology* yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, menyatakan bahwa teknologi finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, stabilitas pada sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran.

Dengan aturan ketat yang dikeluarkan pada akhir 2016 yang berkaitan dengan penentuan batas modal minimal industri *fintech*, Otoritas Jasa Keuangan juga mengawasi bisnis *fintech*. untuk melindungi pelanggan dari layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fintech* ialah suatu inovasi pada jasa

keuangan yang menggunakan teknologi yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan terutama untuk pelaku UMKM yang mempunyai pendapatan rendah.

Kontribusi Dengan bantuan *Fintech* dengan lembaga keuangan, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Palembang dapat lebih terlibat dalam perdagangan. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat yang telah masuk ke berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan, UMKM di kota Palembang akan dapat mengakses layanan keuangan dan melakukan pembayaran secara langsung tanpa harus pergi ke kantor bank. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja pelaku UMKM kota Palembang dan memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan *fintech* dengan tepat dan efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Dimediasi Oleh Inklusi Keuangan Di Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kota Palembang.

2. Tingkat *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kota Palembang.
3. Tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada kinerja UMKM di kota Palembang.
4. Tingkat *financial technology* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada kinerja UMKM di kota Palembang.
5. Tingkat inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kota Palembang.
6. Tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kota Palembang yang dimediasi oleh inklusi keuangan.
7. Tingkat *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kota Palembang yang dimediasi oleh inklusi keuangan.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan permasalahan di atas dapat terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan hanya sebatas tentang “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Dimediasi Oleh Inklusi Keuangan Di Kota Palembang”.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan berdampak pada kinerja UMKM di kota Palembang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial technology* berdampak pada kinerja UMKM di kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan berdampak pada inklusi keuangan pada kinerja UMKM kota Palembang.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial technology* berdampak pada inklusi keuangan pada kinerja UMKM kota Palembang.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inklusi keuangan berdampak pada kinerja UMKM di kota Palembang.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan berdampak pada kinerja UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di kota Palembang.
7. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi, kontribusi serta memperluas wawasan dan pengetahuan berupa tulisan mengenai literasi keuangan, *fintech* terhadap peningkatan kinerja UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di kota Palembang. Selain itu juga, diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan, *fintech* terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di kota Palembang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematis Penulisan

Tujuan dari sistematis penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang akan disajikan dalam proposal ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bagian ini juga memaparkan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu, dibuat suatu sistematis penulisan laporan ini tetap berjalan dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasar teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan dan *fintech* terhadap kinerja keuangan UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di kota Palembang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik dan pembahasan dari hasil yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan sara berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam peneliti

